

## DAFTAR PUSTAKA

Buku Pintar Dana Desa 2017 “Pedoman tentang Dana Desa” diakses tanggal 1 maret 2018 dari  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>

Fajri, Rahmi dan Setyowati, Endah. 2016. “Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (7), 1099-1104

Ismail, Mohammad dkk. 2014. “Konsep dan pengukuran Akuntabilitas”. Tesis Pasca Sarjana Universitas Trisakti

Kholmi, Masiyah. 2016. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di desa kedungbetik Kabupaten Jombang”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 7 (2), 143-152

Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: Andi

m.detik.com. 2017 “Selewengkan dana desa oknum kades di karawang jadi tersangka” diakses tanggal 3 januari 2018 dari  
<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3700168/selewengkan-dana-desa-oknum-kades-di-karawang-jadi-tersangka>

pattiro.org. 2016 “Akuntabilitas Pemerintahan Desa” diakses tanggal 12 Desember 2017 dari  
<http://pattiro.org/2016/03/akuntabilitas-pemerintahan-desa/>

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

PP No. 43 Tahun 2014. Tentang Peraturan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP No. 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Bupati Nganjuk No 4 tahun 2014. Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintahan desa no 22 tahun 2017. Tentang Dana Desa

Sintia, Kiki Debi. 2016. “Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi dana Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Good Governance”. *Jurnal El Mushaba*. 7 (2), 186-202

Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta



Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tenagasosial.com 2014 “Konsep Akuntabilitas dan Transparansi” diakses tanggal 1 maret 2018 dari <http://www.tenagasosial.com/2014/05/makalah-konsepakuntabilitas-dan.html>

UU No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.

Wibisono, Nuribnu dan Purnomo, Herry. 2017. “Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun”. Jurnal AKSI 2, 9-8

